

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keynes

Menurut Keynes (1936) dalam (Sukirno, 2012) bahwa penentuan aktivitas ekonomi didasarkan pada perbelanjaan kumulatif. Untuk mengatur perekonomian dan menguatkan tingkat pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan ekonomi, dan mencegah inflasi maka diperlukan peraturan pemerintah. Menurut teori ini, terjadinya inflasi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini yaitu proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang disediakan oleh masyarakat tersebut (Boediono, 2014). Proses perebutan ini akhirnya menjadi keadaan dimana permintaan barang-barang masyarakat melebihi jumlah barang yang disediakan. Karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia, maka harga-harga akan naik. Adanya kenaikan ini berarti sebagian dari rencana-rencana pembelian kelompok tersebut tidak bisa terpenuhi.

Pernyataan teori ini mendukung hubungan antara GDP dan Inflasi terhadap NPF. Inflasi terjadi karena masyarakat mengharapkan hidup melebihi batas kemampuan ekonominya. Berdasarkan hal tersebut ketika

permintaan akan barang melebihi dari jumlah yang tersedia akan mempengaruhi kebutuhan dana yang digunakan untuk memenuhi permintaan tersebut (Purwaningtyas, Heny & Hartono, 2020).

2. *The Anticipated Income Theory*

Berdasarkan teori ini, tingkat likuiditas bank dapat terjaga ketika bank mampu merencanakan pembayaran kembali di masa mendatang dengan pendapatan yang diperoleh (Hasibuan, 2011). Pernyataan teori ini mendukung hubungan antara FDR dengan NPF dimana bank dapat memberikan pembiayaan sesuai dengan jumlah deposit yang dimiliki bank dengan baik. ketika pembiayaan dilakukan dengan ketat maka kewajiban debitur juga dapat dibayarkan dengan lancar dan akan meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah (Purwaningtyas, Heny & Hartono, 2020).

3. *Signaling Theory*

Signaing Theory atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross (1977) yang menyatakan bahwa pihak eksekutif bank yang memiliki informasi baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor atau nasabah. Teori sinyal menjelaskan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Teori ini mendukung hubungan antara *Bank Size* dan CAR dengan NPF, dimana bank size dapat digambarkan melalui total aset dalam

laporan keuangan. Sedangkan CAR dapat diketahui dalam laporan keuangan pada sisi modal yang dibandingkan dengan aktiva tertimbang menurut risiko.

4. *Non Performing Financing (NPF)*

Untuk mengetahui kualitas aktiva produktif suatu bank syariah, maka (BI, 2006) mengatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 yang didalamnya termuat golongan pembiayaan lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). pembiayaan bermasalah muncul karena suatu pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah di tetapkan oleh BI. Pembiayaan bermasalah dikategorikan dalam pembiayaan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). BI juga mengatur rasio NPF bagi bank syariah maksimal 5%. Ketika bank menyalurkan pembiayaan yang termasuk dalam kategori tersebut maka akan berdampak pula pada rasio bagi hasil yang akan diberikan kepada pemilik dana. Suatu pembiayaan akan termasuk kategori bermasalah apabila bank tidak mampu menanggulangi risiko yang ada akibat penyaluran pembiayaan tersebut, dimana indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan dapat dilihat dari rasio *Non Performing Financing (NPF)* (Firdaus, 2016). Dari pengertian *Non Performing Financing (NPF)* diatas dapat disimpulkan bahwa ketika bank menyalurkan dana yang termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan tersebut bermasalah.

Faktor-faktor yang memicu terjadinya NPF dapat disebabkan oleh pihak bank itu sendiri maupun pihak nasabah. Pihak bank dapat mempengaruhi tingginya rasio NPF karena kinerja bank yang kurang maksimal, faktor ini bersifat mikro ekonomi, sementara pihak nasabah juga dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah karena ketidاكلancaran dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank (Auliani & Syaichu, 2016). Menurut Kasmir (2014), penilaian kesehatan bank perlu dilakukan agar memberikan pandangan yang tepat mengenai kondisi sekarang dan yang akan datang. Penilaian kesehatan bank diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 mengenai Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Risiko yang melekat pada bank (*inherent risk*) merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko dalam penilaian kesehatan bank. Teori sinyal (*signaling theory*) berkaitan dengan variabel ini, berdasarkan teori ini pasar dapat mengetahui dan menilai sendiri informasi perusahaan atau bank. Masyarakat dapat menilai kualitas bank sebelum menanamkan modalnya.

Faktor-faktor yang memicu Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan yaitu:

1. Permodalan (*capital*)
2. Kualitas asset (*asset quality*)
3. Rentabilitas (*earning*)

4. Likuiditas (*liquidity*)
5. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*)
6. Manajemen (*management*)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PJOK.03/2017, rumus penilaian pembiayaan bermasalah atau NPF dapat dihitung dengan (Asnaini, 2017):

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

5. **Gross Domestic Product (GDP)**

Dalam industri perbankan yang menyediakan jasa keuangan, kinerja dari pelaku ekonomi dapat diukur dengan rasio GDP. Sukirno (2012) menyatakan bahwa GDP merupakan salah satu indeks dari pertumbuhan ekonomi baik dari segi pendapatan dan pengeluaran yang pada intinya akan mengukur tingkat produksi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Sukirno (2012), GDP merupakan konsep yang paling penting dibandingkan konsep pendapatan lainnya. Sedangkan menurut Prasetyo (2011), GDP merupakan seluruh barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat pada suatu wilayah negara yang bersangkutan. Dalam perekonomian suatu negara, bukan hanya

perusahaan milik penduduk negara sendiri saja yang memproduksi barang dan jasa, tetapi juga penduduk luar negeri. Nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara akan naik apabila perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara, rasio ini dinilai menurut harga pasar dan dapat didasarkan pada harga yang berlaku dan harga tetap.

Menurut Asnaini (2017) indikator dalam pengukuran GDP yaitu pendapatan, pengeluaran atau investasi, pengeluaran pemerintah dan selisih eksport-import. GDP akan menyajikan penilaian secara optimal dalam mengukur produk yang dihasilkan. (Kuttikulsingh, 1999) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pertumbuhan GDP kurang dari 10% maka setengah pinjaman akan macet. Teori Keynes menjelaskan hubungan GDP dengan NPF. Teori ini menyatakan bahwa pengeluaran tergantung dari pendapatan. Semakin tinggi pendapatan maka konsumsi juga akan naik. Berdasarkan beberapa pengertian GDP dapat disimpulkan bahwa GDP merupakan indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari jumlah keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode waktu tertentu. Kondisi resesi ekonomi akan menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan yang mengakibatkan kesulitannya perusahaan dalam mengembalikan pembiayaan kepada bank. Secara matematis GDP dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{GDPt} - \text{GDPt-1}}{\text{GDPt-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

GDPt : *Gross Domestic Product* (pendapatan nasional riil) pada tahun t

GDPt-1: *Gross Domestic Product* (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya.

6. Inflasi

Menurut Boediono (2014) inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga secara terus menerus. Sedangkan menurut Bank Indonesia inflasi merupakan kesulitan dalam suatu perekonomian yang terjadi secara kontinu dari waktu ke waktu seiring dengan peningkatan harga umum yang terjadi (BI, 20). Kemerosotan kekayaan dan pendapatan masyarakat akan mempengaruhi tingkat daya beli suatu produk, dimana dalam kondisi demikian perusahaan akan dililit beban produksi dan pemasaran sehingga mengakibatkan pendapatan suatu perusahaan mengalami penurunan juga (Boediono, 2014).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan publikasi, pelaku ekonomi dapat memperkirakan inflasi yang akan terjadi di masa mendatang, sehingga pada saat mendekati range, mereka dapat mengantisipasi dini dan menekan gangguan kelancaran pengembalian pinjaman bank. Naiknya jumlah

uang yang beredar melebihi pertumbuhan sektor riil akan menyebabkan inflasi karena nilai uang menjadi rendah. Resiko nilai uang merupakan nilai riil dari pembiayaan ditambah dengan pembagian bagi hasil akan menjadi lebih kecil, untuk itu bank perlu berhati-hati dalam melakukan realisasi pembiayaan (Akbar, 2016). Teori Keynes mendukung pengaruh Inflasi terhadap NPF. Sesuai teori ini, inflasi merupakan proses perebutan diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang disediakan. Dari beberapa definisi mengenai inflasi maka dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan peristiwa moneter yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang secara umum yang dapat mengakibatkan penurunan nilai mata uang. Menurut Boediono (2014) Inflasi terbagi menjadi 3 kategori, yang pertama berdasarkan tingkat keparahan inflasi dibedakan menjadi:

- (1) Inflasi ringan ($< 10\%$ setahun)
- (2) Inflasi sedang (antara 10-30% setahun)
- (3) Inflasi berat (antara 30-100% setahun)
- (4) Hiperinflasi ($> 100\%$ setahun)

Penggolongan inflasi kedua yaitu atas dasar sebab terjadinya inflasi. Inflasi ini dibedakan menjadi dua macam yakni:

- (1) *Demand inflation*, inflasi yang timbul karena permintaan barang masyarakat terlalu banyak.

(2) *Cost Inflation*, inflasi ini timbul karena tingginya biaya produksi.

Penggolongan inflasi ketiga yaitu berdasarkan asal inflasi. Inflasi ini dibagi menjadi:

(1) *Domestic inflation*, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri seperti anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen yang gagal, dsb.

(2) *Imported Inflation*, inflasi ini timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara yang langganan berdagang di negara kita.

Menurut Badan Pusat Statistik, untuk mengetahui rasio inflasi, dilakukan perhitungan Inflasi yaitu:

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{n-1}}{\text{IHK}_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK_n : Indeks Harga Konsumen (IHK) pada periode ke-n

IHK_{n-1}: Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun sebelumnya

7. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang

diterbitkan oleh Bank Indonesia. Menurut Kasmir (2014), penerbitan SBI berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap Operasi Pasar Terbuka (OPT) dalam masalah penanggulangan jumlah uang beredar. Sesuai fatwa MUI No. 64/DSN-MUI/XII/2007 menyatakan bahwa SBI berbeda dengan SBIS, perbedaan tersebut ada pada tingkat pengembaliannya. SBIS akan menerapkan return berdasarkan pada manfaat yang diperoleh dari investasi, sedangkan SBI untung maupun rugi investasi tidak bergantung pada tingkat suku bunga.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No 10/11/PBI/2008, tujuan diterbitkannya SBIS yakni untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter sesuai prinsip syariah melalui Operasi Pasar Terbuka. Bank Indonesia dalam penerbitan SBIS menggunakan sistem lelang menggunakan akad ju'alah, baik BUS maupun UUS dapat memiliki SBIS apabila memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang ditetapkan BI, BUS atau UUS juga dapat mengajukan pembelian SBIS secara langsung melalui perusahaan pialang pasar uang dan valuta asing (PBI, 2008). *Signaling Theory* menjelaskan hubungan antara SBIS dengan NPF. Menurut teori ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi perusahaan dengan melihat dari laporan keuangannya. SBIS diterbitkan menggunakan akad Ju'alah dan melalui mekanisme lelang, pihak yang dapat mengikuti lelang salah satunya adalah bank umum syariah. Menurut Dahlan (2015) SBIS merupakan

sarana investasi bagi bank syariah, maka diharapkan akan memperoleh *return* yang tinggi sehingga bank juga akan mengeluarkan pembiayaan yang tinggi pula. Dari pengertian-pengertian SBIS dapat disimpulkan bahwa SBIS merupakan instrument moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk menarik dana asing ke dalam pasar keuangan Indonesia. BI akan memberikan imbalan kepada bank syariah yang membantu dalam pengendalian moneter dengan membeli SBIS yang wajib dibayarkan pada saat jatuh tempo.

Karakteristik SBIS dalam (PBI, 2008):

- a. Satuan unit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Berjangka waktu 1-12 bulan.
- c. Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*).
- d. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.
- e. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

SBIS merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, sehingga SBIS termasuk dalam penempatan dana pada Bank Indonesia. SBIS dapat dihitung dengan rumus (Gumilarty & Indriani, 2016):

$$SBIS = Ln (\text{Jumlah penempatan dana pada SBIS})$$

8. Bank Size

Untuk mengukur besar kecilnya perusahaan terlihat dari seberapa besar nilai ekuitas, nilai penjualan, atau nilai aktiva yang dimiliki perusahaan

(Riyanto, 2013). Sedangkan menurut Torang (2012), untuk mengetahui tuntutan pelayanan atau produk perusahaan, ukuran perusahaan merupakan variabel konteks yang dapat digunakan. Berdasarkan total asset yang dimiliki, maka dapat diketahui apakah perusahaan tersebut termasuk perusahaan besar, perusahaan menengah, atau perusahaan kecil.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah, kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan dan juga memiliki penghasilan tahunan Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000. Sedangkan kriteria yang termasuk perusahaan menengah yaitu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 dan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan. Kriteria perusahaan menengah juga harus memiliki penghasilan tahunan paling banyak Rp 50.000.000.000 (UU, 2008). Variabel *Bank Size* dinyatakan dalam bentuk logaritma natural dari total nilai aset. Total asset memiliki sifat yang lebih jangka panjang sehingga dijadikan sebagai indikator ukuran bank. Teori sinyal (*signaling theory*) mendukung hubungan *Bank Size* dengan NPF dalam penelitian ini. Menurut teori ini, sinyal mempengaruhi pasar melalui informasi perusahaan, sehingga pasar dapat menilai sinyal tersebut dengan asumsi pribadi. Bank yang besar akan menunjukkan total aset yang besar. Berdasarkan beberapa pengertian dapat diketahui bahwa ukuran

perusahaan merupakan rasio yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, total modal atau total penjualan. Total aset dalam bentuk logaritma memiliki nilai lebih rendah yaitu dalam skala puluhan yang nantinya diharapkan bisa menghasilkan besaran angka yang lebih sesuai dengan variabel lain. Rumus ukuran bank adalah sebagai berikut (Purwaningtyas, Heny & Hartono, 2020):

$$\text{Bank Size} = \text{Ln} (\text{Total Aset Perusahaan})$$

Berdasarkan kriteria perusahaan menurut Bank Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa semakin besar dana perusahaan dikarenakan banyaknya kekayaan yang dimiliki perusahaan. Oleh karenanya pada perusahaan perbankan yang tergolong perusahaan besar, kemungkinan tersedianya dana yang dimiliki juga besar. Besar kecilnya dana yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi realisasi pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah (Adnan, 2016).

9. Finance to Deposit Ratio (FDR)

Tingkat pembiayaan terhadap dana pihak ketiga diukur sejauh mana dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dapat diketahui dari rasio FDR. Menurut Kasmir (2014) Tinggi rendahnya rasio ini akan mempengaruhi likuiditas bank yang digunakan dalam penyaluran dana. Jika jumlah dana yang disalurkan sedikit

maka tingkat likuiditas bank akan semakin rendah dan begitu pula sebaliknya. Menurut Asnaini (2017), untuk mengetahui penyaluran dana simpanan oleh bank syariah yaitu dengan cara mengomparasi jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki bank syariah maka digunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dapat mengimbangi kewajiban bank dalam memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uang yang di simpan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia rasio FDR yang diperbolehkan adalah 110% diberi nilai pembiayaan 100, artinya likuiditas bank dinilai sehat. Apabila rasio FDR 110% atau lebih diberi nilai 0, artinya likuiditas bank dinilai tidak sehat. *The anticipated income theory* mendukung hubungan FDR dengan NPF. Menurut teori ini, tingkat likuiditas bank dapat dijaga saat bank mampu merencanakan pembayaran kembali di masa mendatang. Semakin tinggi FDR maka kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah juga akan meningkat, maka bank perlu kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. Dari pengertian-pengertian FDR diatas dapat disimpulkan bahwa FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan simpanan masyarakat. Rasio ini dinilai sebagai indikator kerawanan dan kemampuan

dari suatu bank. Rasio FDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Asnaini, 2017):

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

10. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Kasmir (2016) menyatakan bahwa CAR merupakan perbandingan rasio CAR dengan rasio modal Aktiva Tertimbang Menurut Risiko sesuai dengan ketentuan pemerintah. Menurut Fahmi (2015) CAR atau rasio kecukupan modal merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana sebuah bank mampu membiayai kegiatannya dengan modal yang dimiliki. Tinggi rendahnya rasio CAR tergantung pada kemampuan bank dalam menanggulangi risiko yang terjadi. Ketentuan BI mengatur cara perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang terdiri atas jumlah ATMR berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11/PJOK.03/2016 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum pasal 2 menyatakan bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM). *Signaling Theory* menyatakan bahwa pasar dapat menilai sendiri sinyal yang

diberikan oleh perusahaan melalui laporan keuangan. Ketika rasio CAR tinggi maka bank akan merasa aman dalam penyaluran pembiayaan. *Signaling theory* digunakan untuk mendukung hubungan CAR dengan NPF dalam penelitian ini. Berdasarkan beberapa pengertian CAR maka dapat disimpulkan bahwa CAR merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank syariah. Penyediaan modal minimum ditetapkan sbb:

- a. 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi bank dengan profil risiko peringkat 1.
- b. 9% sampai dengan kurang dari 10% ATMR bagi bank dengan profil risiko peringkat 2.
- c. 10% sampai dengan kurang dari 11% ATMR bagi bank dengan profil risiko peringkat 3.
- d. 11% sampai dengan kurang dari 14% ATMR bagi bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5.

Untuk mengetahui rasio CAR, BI telah mengatur dalam Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP/2004 dan merumuskannya sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang menguji tentang variabel dependen yaitu *Non Performing Financing* (NPF) yang dihubungkan dengan berbagai variabel independen. Berbagai analisis faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan telah dilakukan oleh beberapa penelitian yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

No.	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
1.	Asnaini (2017) JOCE IP Vol. 11 No. 1 ISSN: 1978-6875	Y = <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X1= <i>Gross Domestic Product</i> X2= <i>Inflasi</i> X3= <i>SBIS</i> X4= <i>Financing to Deposit Ratio</i> X5= <i>Capital Adequacy Ratio</i>	1. GDP berpengaruh negatif terhadap NPF. 2. FDR dan CAR berpengaruh terhadap NPF. 3. Inflasi berpengaruh positif terhadap NPF. 4. SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap NPF.
2.	Pradana (2018) EKSSIS: ejournal.stiedewantara.ac.id Vol. 13 No. 2 P-ISSN: 1907-7513 E-ISSN: 2549-6016	Y = <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X1= <i>Financing to Deposit Ratio</i> X2= <i>Financing to Asset Ratio</i> X3= <i>Reserve Requirement</i> X4= <i>Inflasi</i> X5= <i>Nilai Tukar</i>	1. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. 2. Inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF.
3.	Aryani, dkk (2016) Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 4 No. 1 P-ISSN: 2337-6333 E-ISSN: 2355-4643	Y = <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X1= <i>Financing to Deposit Ratio</i> X2= <i>Bank Size</i> X3= <i>Capital Adequacy Ratio</i> X4= <i>Kualitas Aktiva Produktif</i> X5= <i>Net Income Margin</i> X6= <i>Biaya Overhead</i> X7= <i>BI Rate</i> X8= <i>SBIS</i>	1. FDR berpengaruh positif terhadap NPF. 2. CAR dan SBIS berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.
4.	Lidyah (2016) Jurnal I –Finance Vol. 2 No.	Y = <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	1. Inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF

	1 P-ISSN: 2615-1081 E-ISSN: 2476-8871	X1= Inflasi X2= BI Rate X3= <i>Capital Adequacy Ratio</i> X4= BOPO	2. CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.
5.	Akbar (2016) Jurnal <i>I-Economic</i> Vol. 2 No. 2 P-ISSN: 2548-5601 E-ISSN: 2548-561X	Y = <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X1= Inflasi X2= <i>Gross Domestic Product</i> X3= <i>Capital Adequacy Ratio</i> X4= <i>Financing to Deposit Ratio</i>	1. Inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF. 2. GDP; CAR; FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.
6.	Wijoyo (2016) Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Vol. 2 No. 6 ISSN: 2549-5771	Y = <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X1= Inflasi X2= Nilai Tukar X3= <i>Finance Growth</i> X4= <i>Financing to Deposit Ratio</i> X5= BOPO	1. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. 2. FDR berpengaruh positif terhadap NPF.
7.	Hernawati dan Puspasari (2018) JIFA, Vol. 1 No.1 2018 P-ISSN: 2615-1774 E-ISSN: 2615-1782	Y = <i>Pembiayaan Bermasalah</i> (NPF) X1= Inflasi X2= BI Rate X3= Nilai Tukar	Inflasi berpengaruh positif terhadap NPF.
8.	Firdaus (2016) El-Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 3 No.1 E-ISSN: 2622-0083 https://doi.org/10.18860/ed.v3i1.3339	Y = <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X1= <i>Pembiayaan</i> X2= <i>Capital Adequacy Ratio</i> X3= <i>Gross Domestic Product</i> X4= Inflasi X5= Nilai Tukar(kurs)	1. CAR dan GDP berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. 2. Inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF.
9.	Rosidah (2017) Jurnal Akuntansi Vol. 12 No. 2 P-ISSN: 1907-9958 E-ISSN: 2685-9246	Y = <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X = <i>Financing to Deposit Ratio</i>	FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.
10.	Haifa dan Wibowo (2015) Jurnal Nisbah Vol. 1 NO. 2 P-ISSN: 2442-4455 E-ISSN: 2528-6633 DOI: http://dx.doi.org/10.30997/jn.v1i2	Y = <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X1= <i>Capital Adequacy Ratio</i> X2= <i>Financing to Deposit Ratio</i> X3= FING (<i>Financing Growth</i>) X4= RF (<i>Profit Los Sharing</i>) X5= Inflasi X6= Kurs	1. CAR berpengaruh positif terhadap NPF. 2. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. 3. Inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF.
11.	Auliani dan Syaichu (2016) <i>Diponegoro Journal of Management</i> Vol. 5 No. 3	Y = <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	1. SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. 2. FDR berpengaruh positif

	E-ISSN: 2337-3792	X1= BOPO X2= Capital Adequacy Ratio X3= Financing to Deposit Ratio X4= SBIS X5= Inflasi X6= Kurs	terhadap NPF. 3. CAR dan Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.
12.	Vanni (2017) EQUILIBRUM: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 P-ISSN: 2355-0228 E-ISSN: 2502-8316	Y = Non Performing Financing (NPF) X1= Financing to Deposit Ratio X2= Kurs X3= Inflasi	1. FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. 2. Inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF.
13.	Indrajaya Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 5 No. 1 2019 P-ISSN: 2442-6563 E-ISSN: 2527-3027 DOI: 10.20473/jebis.v5i1.13180	Y = Non Performing Financing (NPF) X1= Capital Adequacy Ratio X2= Financing to Deposit Ratio X3= BOPO X4= Inflasi X5= Kurs X6= Gross Domestic Product	1. CAR dan GDP berpengaruh negatif terhadap NPF. 2. FDR dan Inflasi berpengaruh positif terhadap NPF.
14.	Wibowo dan Saputra (2017) Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 2 No. 1 P-ISSN: 2527-4090 E-ISSN: 2528-1399 DOI: 10.23887/jia.v2i1.10040	Y = Pembiayaan Bermasalah (NPF) X1= Inflasi X2= Gross Domestic Product X3= Ukuran Bank (Bank Size) X4= Financing to Deposit Ratio X5= Financing to Asset Ratio X6= Capital Adequacy Ratio	1. Inflasi dan FDR berpengaruh positif terhadap NPF. 2. GDP;Ukuran Bank;CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.
15.	Effendi, dkk (2017) Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 25 No. 1 P-ISSN: 0852-7172 E-ISSN: 2461-064X DOI: 10.21580/ws.25.1.1.1540	Y = Non Performing Financing (NPF) X1= Reserve Requirement X2= Return On Asset X3= Capital Adequacy Ratio X4= BOPO X5= Bank Size X6= Gross Domestic Product X7= Inflation	1. Bank Size;CAR;Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. 2. GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.
16.	Nihayah (2018) <i>Journal of Finance and Islamic Banking</i> Vol. 1 No. 1 P-ISSN: 2615-2967 E-ISSN: 2615-2975	Y = Non Performing Financing (NPF) X1= Capital Adequacy Ratio X2= Return On Asset X3= Financing to Deposit Ratio X4= Productive Financing Ratio X5= Earning Asset Quality	1. CAR tidak berpengaruh negatif terhadap NPF. 2. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF.
17.	Mubarok, dkk (2019) <i>International Journal of Multidisciplinary Research</i>	Y = Non Performing Financing (NPF)	1. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. 2. Capital Adequacy

	<i>and Development</i> Vol. 6 No. 3, page no 05-11 P-ISSN: 2349-5979 E-ISSN: 2349-4182	X1= <i>Inflation</i> X2= <i>BI Rate</i> X3= <i>Exchange Rate</i> X4= <i>Loan To Asset Ratio</i> X5= <i>Capital Adequacy</i>	berpengaruh negatif terhadap NPF.
18.	Firmansari dan Suprayogi (2015) Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESTT) Vol. 2 No. 6 P-ISSN: 2407-1943 E-ISSN: 2502-1508	Y = <i>Non Performing Financing (NPF)</i> X1= <i>Gross Domestic Product</i> X2= <i>Inflasi</i> X3= <i>Financing to Deposit Ratio</i>	1. GDP berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. 2. FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. 3. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.
19.	Nugrohowati dan Bimo (2019) Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Vol. 5 No. 1 P-ISSN: 2088-9968 E-ISSN: 2614-6908 DOI: 10.20885/JEKI.vol5.issl.art6	Y = <i>Non Performing Financing (NPF)</i> X1= <i>Total Aset</i> X2= <i>Capital Adequacy Ratio</i> X3= <i>BOPO</i> X4= <i>Return On Asset (ROA)</i> X5= <i>BI Rate</i> X6= <i>Produk Regional Domestik Bruto</i> X7= <i>Inflasi</i> X8= <i>Tingkat Pengangguran</i>	1. Inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF. 2. CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. 3. BOPO;PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap NPF.
20.	Perdani, dkk (2019) Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 14 No. 1 E-ISSN: 2613-9170 P-ISSN: 1907-4433	Y = <i>Non Performing Financing (NPF)</i> X1= <i>Capital Adequacy Ratio</i> X2= <i>Financing to Deposit Ratio</i> X3= <i>Biaya Operasional Pendapatan Operasional</i> X4= <i>Inflasi</i>	1. CAR dan FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. 2. Inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF.
21.	Muhammad, (2018) <i>EFFICIENT Indonesian Journal of Development Economics</i> Vol.2 No.1 P-ISSN: 2655-6197 E-ISSN: 2655-318X DOI: https://doi.org/10.15294/efficient.v2i1.28404	Y = <i>Non Performing Financing (NPF)</i> X1= <i>Capital Adequacy Ratio</i> X2= <i>Education and Training Costs (BPP)</i> X3= <i>Inflation</i> X4= <i>Gross Domestic Product</i>	1. CAR dan GDP berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. 2. Inflasi berpengaruh positif terhadap NPF.
22.	Masthuroh, dkk (2015) Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Vol. 1 No. 4 ISSN: 2338-9753	Y = <i>Non Performing Financing (NPF)</i> X1= <i>Gross Domestic Product</i> X2= <i>Inflasi</i>	1. GDP berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. 2. Inflasi berpengaruh positif terhadap NPF.
23.	Amelia (2019) Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 8 No. 1 P-ISSN: 2303-2952	Y = <i>Non Performing Financing (NPF)</i> X1= <i>Capital Adequacy Ratio</i> X2= <i>Inflasi</i>	1. CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. 2. Inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF. 3. FDR berpengaruh positif

	E-ISSN: 2622-8491	X3= Financing to Deposit Ratio	terhadap NPF.
24.	Endah Sulastri, dkk (2016) Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 20 No. 2 ISSN: 1410-9204 DOI: 10.24123/jeb.v20i1.1596	Y = Non Performing Financing (NPF) X1= Gross Domestic Product X2= KURS X3= Rasio return pembiayaan PLS dibanding return total pembiayaan (RR) X4= Alokasi piutang Murabahah terhadap alokasi pembiayaan PLS	1. GDP berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.
25.	Asmara (2019) OECONOMICUS <i>Journal of Economics</i> Vol. 4 No. 1 P-ISSN: 2548-6004 E-ISSN: 2715-4882 DOI: 10.15642/oje.2019.4.1.21-34	Y = Non Performing Financing (NPF) X1= Inflasi X2= Kurs X3= Gross Domestic Product X4= Capital Adequacy Ratio X5= Finance to Deposit Ratio X6= BOPO	1. Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. 2. CAR berpengaruh positif terhadap NPF. 3. GDP dan FDR berpengaruh negatif terhadap NPF.
26.	Munifatussa'idah dan Lestari (2019) Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 9 No. 1 ISSN: 2088-9380	Y = Non Performing Financing (NPF) X1= Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) X2= Finance to Deposit Ratio X3= BOPO X4= Gross Domestic Product	1. KPPM dan FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF 2. GDP berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF.
27.	Neli Lestiani, dkk (2020) Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 6 No. 1 ISSN: 2460-6553	Y = Non Performing Financing (NPF) X1= Inflasi X2= Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) X3= Return On Asset (ROA)	1. Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap NPF.
28.	Astriani, dkk (2018) Bisma: Jurnal Manajemen Vol. 4 No. 1 P-ISSN: 2476-8782	Y = Non Performing Loan (NPF) X1 = Capital Adequacy Ratio (CAR) X2 = Loan to Deposit Ratio (LDR) X3 = Bank Size	1. CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL 2. LDR dan Bank Size berpengaruh positif signifikan terhadap NPL.

C. Kerangka Penelitian

1. Pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap *Non performing Financing* (NPF)

Pengukuran tingkat produksi yang dihasilkan oleh suatu entitas dapat dilihat melalui rasio GDP/PDB, dimana di dalamnya termasuk pendapatan dan pengeluaran (Asnaini, 2017). Tinggi rendahnya suatu pendapatan perusahaan akan mengakibatkan kapabilitas perusahaan dalam mengembalikan kewajiban pada bank. Ketika terjadi peningkatan ekonomi, maka pendapatan yang diperoleh perusahaan juga akan meningkat guna mendukung kelancaran perusahaan dalam mengembalikan pinjaman bank. Dalam kondisi meningkatnya GDP maka akan memberikan kontribusi penurunan terhadap rasio NPF.

Teori Keynes menjelaskan hubungan antara pertumbuhan GDP dengan risiko pembiayaan bermasalah. Persamaan $Y = C + S$ menghubungkan pertumbuhan GDP dengan NPF. Teori Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi (C) tergantung dari pendapatan (Y), semakin tinggi pendapatan maka konsumsi juga akan tinggi. Berdasarkan penjelasan diatas didukung oleh penelitian yang Firdaus (2016), Efendi, dkk (2017), Firmansari & Suprayogi (2015), Muhammad (2018), Mashturoh, dkk (2015) yang dalam penelitiannya menyatakan hasil GDP berpengaruh positif signifikan terhadap NPF.

2. Pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Boediono (2014), inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga secara terus menerus. Inflasi dianggap sebagai suatu hal buruk yang berdampak besar pada perekonomian suatu negara. Peningkatan jumlah uang yang melampaui sektor riil mengakibatkan inflasi, karena kegunaan uang selalu menurun (Auliani & Syaichu, 2016). Bukan hanya mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat, tetapi hal ini juga akan mengakibatkan penurunan pada tingkat bagi hasil investasi bank syariah. Dengan kondisi kesulitan perekonomian yang disebabkan oleh inflasi yang tinggi akan berakibat pada kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan. Sesuai teori Keynes, inflasi merupakan proses perebutan diantara kelompok sosial yang menginginkan bagian lebih besar daripada yang disediakan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Auliani & Syaichu (2016), Effendi (2017), Mubarak, dkk (2019), Firmansari & Suprayogi (2015), yang menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.

3. Pengaruh SBIS terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

SBIS merupakan salah satu investasi dalam bank syariah yang akan dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan. Jumlah uang beredar akan menjadi sedikit karena dana tersebut ditanamkan pada investasi SBIS. Sehingga pada saat jumlah imbal hasil SBIS naik maka bank akan

mengurangi penyaluran pembiayaan (Auliani & Syaichu, 2016). Akibat pengurangan penyaluran pembiayaan akan berimbas pada jumlah uang yang beredar lebih sedikit dan menyebabkan kesulitan pengembalian pembiayaan oleh nasabah. SBIS yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan NPF. Teori sinyal mendukung hubungan antara SBIS dengan NPF. Menurut teori ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi bank melalui laporan keuangan yang di terbitkan. Pernyataan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Auliani & Syaichu (2016), dan Asnaini (2017) yang menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap NPF.

4. Pengaruh *Bank Size* terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Untuk mengukur besar kecilnya perusahaan terlihat dari seberapa besar nilai ekuitas, nilai penjualan, atau nilai aktiva yang dimiliki perusahaan (Riyanto, 2013). Sesuai dengan *Signaling Theory* yang menyatakan bagaimana sinyal mempengaruhi pasar melalui informasi perusahaan sehingga pasar dapat menilai sinyal tersebut dengan asumsi pribadi. Bank yang besar akan menunjukkan total asset yang besar pula. Bank yang memiliki asset yang besar juga akan memiliki profesionalitas dalam sistem penanggulangan ketika terjadinya pembiayaan bermasalah (Wibowo & Saputra, 2017). Baiknya sistem penanggulangan ini akan menekan resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Penelitian yang mendukung pernyataan ini dilakukan oleh Wibowo & Saputra (2017) dan Effendi et al (2017) yang

menyatakan hasil dalam penelitiannya bahwa *Bank Size* berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.

5. Pengaruh *Finance to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

FDR mencerminkan seberapa besar rasio likuiditas suatu bank. Tinggi rendahnya likuiditas bank akan berakibat pada kapabilitas bank dalam upaya menekan angka pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi. Tinggi rendahnya rasio FDR dipengaruhi oleh realisasi pembiayaan bank yang diberikan kepada nasabah. Berdasarkan dengan *the anticipated income theory* tingkat likuiditas bank dapat terjaga ketika bank mampu merencanakan pembayaran kembali di masa mendatang. Teori ini mendukung pengaruh FDR dengan NPF. Ketika pembiayaan yang disalurkan melalui proses yang ketat maka debitur dalam membayar kewajiban juga akan lancar sehingga akan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah (Purwaningtyas & Hartono, 2020) Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Asnaini (2017), Akbar (2016), Rosidah (2017), Vanni (2017), Perdani, dkk (2019), Munifatussa'idah & Lestari (2019) yang menyatakan dalam hasil penelitiannya FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.

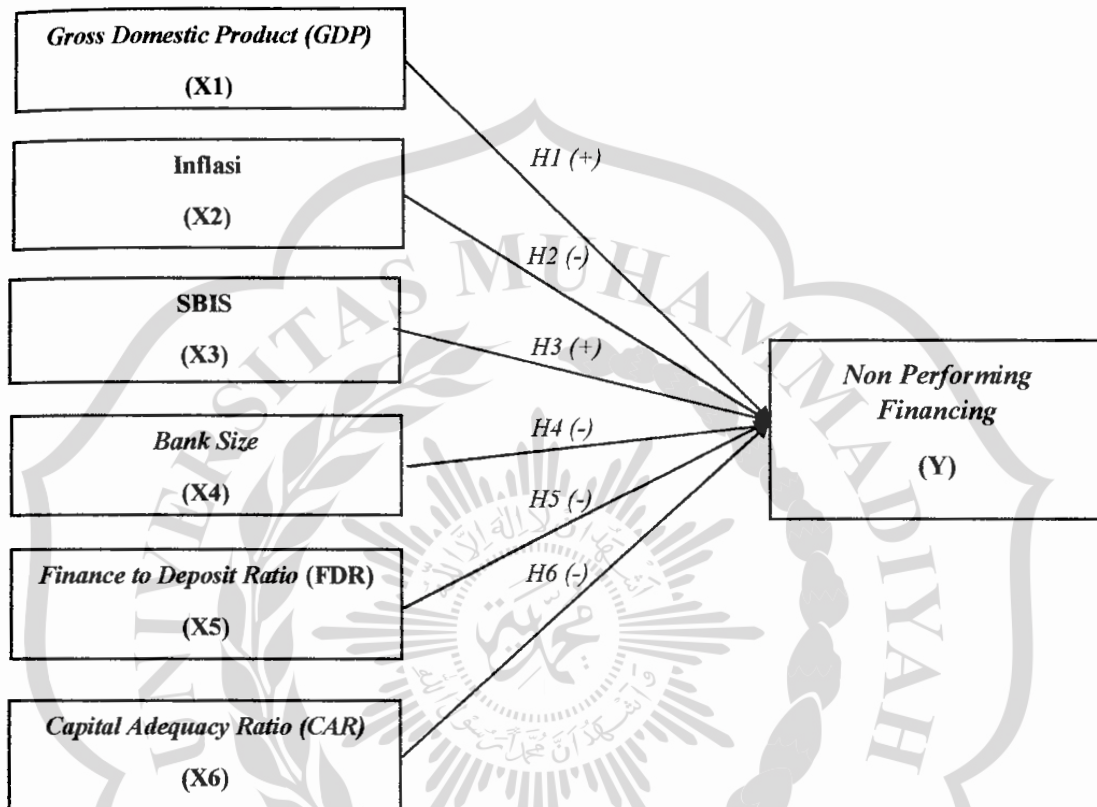
6. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio kecukupan modal atau CAR merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana bank mampu membiayai aktivitasnya dengan modal

yang dimiliki (Fahmi, 2015). Berdasarkan teori sinyal (*signaling theory*) yang menyatakan bahwa pasar dapat menilai sendiri sinyal yang diberikan oleh perusahaan melalui laporan keuangan. Ketika rasio CAR tinggi maka bank akan merasa aman dalam penyaluran pembiayaan tetapi hal ini memicu pada penyaluran pembiayaan yang tidak efektif. Menurut Soebagio (2015) bank akan memiliki profesionalitas yang tinggi ketika mereka memiliki modal yang tinggi sehingga CAR merupakan faktor berbahaya yang dapat dihindari. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Asnaini (2017), Aryani, dkk (2016), Auliani & Syaichu (2016), Indrajaya (2019), Wibowo & Saputra (2017), Effendi et al (2017), Perdani & Lia (2019), dan Amelia (2019) yang menyatakan dalam hasil penelitiannya CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.

Kerangka konseptual pada penelitian ini berkaitan dengan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen *Non Performing Financing* (NPF) dan variabel independen yaitu untuk menguji tentang pengaruh faktor eksternal *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi, dan SBIS. Sedangkan variabel internal yaitu *Bank Size*, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berikut ini model penelitian yang dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka konseptual yang disusun, penelitian ini mengusulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh positif signifikan terhadap *Non performing Financing* (NPF).

H2: Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

H3: SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

H4: *Bank Size* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

H5: *Finance to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

H6: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

